

# Perkembangan Politik dan Ekonomi di Masa Demokrasi Terpimpin



Disusun Oleh :

Jesiska Lorenza

XII IPA

Tahun ajaran 2021/2022

## **A. Awal mula terbentuknya Demokrasi Terpimpin**

Ketidakstabilan politik pada masa awal kemerdekaan menjadi salah satu penyebab awal mula terbentuknya demokrasi terpimpin. Banyaknya pemberontakan yang terjadi, kabinet yang sering berganti, banyaknya program kerja yang tidak dapat terlaksana, dan masih banyak lagi menjadi alasan dicetuskannya demokrasi terpimpin oleh Ir. Soekarno. Presiden Soekarno juga menganggap bahwa demokrasi liberal merupakan hasil impor dari luar negeri yang dianggap kurang cocok dengan bangsa Indonesia. Gagasan itu muncul setelah melihat bahwa pada masa demokrasi liberal yang bercirikan dengan adanya kabinet.

Banyak partai politik yang akhirnya bersaing satu sama lain, perbedaan visi misi tiap partai dan berusaha menjatuhkan kabinet yang sedang menjabat dengan mosi tidak percaya. Hal itu membuat banyak program kerja dari setiap partai politik tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, dewan konstituante yang dibentuk juga gagal membentuk Undang-Undang Dasar yang baru yang menyebabkan banyak kekacauan kondisi Negara dan memancing persaingan politik sehingga gagasan ini muncul. Gagasan ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Konsepsi Presiden tahun 1957 oleh Soekarno. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi jembatan menuju demokrasi terpimpin. Isi Dekrit Presiden yaitu

- a. dibubarkannya konstituante,
- b. tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, serta
- c. pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara.

Dengan tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya UUD 1945 menjadi akhir dari demokrasi liberal dan awal dari demokrasi terpimpin.

## **B. Perkembangan Kehidupan Politik**

Di masa ini, kekuasaan politik tertinggi berada di tangan presiden dengan TNI AD dan PKI yang membantunya. Terbentuk lima gagasan penting dalam Manifesto Politik (Manipol) USDEK meliputi, UUD 45, sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol-USDEK menjadi

ideologi dan haluan negara dan sejak tahun 1961 menjadi mata kuliah wajib yang terdapat dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi).

Di masa ini hanya ada sembilan partai politik yang diakui dan peran partai politik dibatasi pemerintah dengan menerapkan penetapan Presiden no 7 tahun 1959. Banyak fraksi dalam DPR yang menolak kebijakan itu sehingga terjadi konflik antara presiden dan DPR dan puncaknya terjadi saat DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Akhirnya, DPR dibubarkan tanggal 24 Juni 1960 dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang dipilih sendiri oleh presiden. 1 Mei 1963, MPRS menetapkan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

Presiden mendapat dukungan 3 kekuatan besar yaitu komunis, agama, dan nasional dan mengeluarkan ajaran nasionalis, agama, dan komunis (nasakom). Ajaran Nasakom mulai diajarkan dan hal ini dimanfaatkan oleh PKI karena melaksanakan Manipol berarti melaksanakan program PKI. PKI mendapat tempat dan berhasil meyakinkan presiden. Hal itu menimbulkan rasa tidak terima dari AD dan mereka berusaha menghambat pergerakan PKI serta memperingatkan presiden tetapi hal itu diabaikan.

Ada beberapa kekacauan yang terjadi dalam masa ini. Pertama adalah Pembebasan Irian Barat dikarenakan keputusan KMB yang menetapkan bahwa Irian Barat akan diserahkan dalam setahun, tetapi hal itu tidak ditepati sehingga dilakukan beberapa perjuangan untuk membebaskan Irian Barat yaitu dengan Diplomasi tetapi gagal, melalui konfrontasi Politik dengan membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dan memutus hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda, melalui Konfrontasi Militer dengan Tri Komando Rakyat (Trikora), melakukan beberapa operasi militer, melalui konfrontasi ekonomi dengan pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda, melarang maskapai penerbangan Belanda, memindahkan pasar komoditas Indonesia ke Bremen (Jerman), dan melalui persetujuan New York dengan hasil akhir bahwa Belanda harus menyerahkan Irian Barat paling lambat 1 Oktober 1962.

Kedua, Konfrontasi Malaysia disebabkan adanya deklarasi ingin membentuk Federasi Malaysia yang mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Indonesia menganggap ini sebagai rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Untuk meredakan ketegangan dilakukan Konferensi Maphilindo dan

menghasilkan tiga dokumen penting yang intinya adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara setuju,. Akan tetapi, sebelum hal itu dilakukan, Federasi Malaysia lebih dahulu dideklarasikan dan hal ini memicu ketegangan politik. Ketiga, Politik Mercusuar yang dilakukan dengan membangun proyek-proyek untuk menunjukkan kemegahan Indonesia yang diharapkan dapat menerangi negara-negara Nefo. Dengan pengeluaran yang banyak dan pendapatan yang tidak setimpal, akhirnya terjadi pembengkakan anggaran biaya.

### **C. Kehidupan Ekonomi**

Pemerintah memiliki peranan besar menentukan kebijakan ekonomi dan terdapat banyak pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi vital bagi perekonomian negara. Aset-aset milik pengusaha asing terutama Belanda diambil alih dan dinasionalisasikan. Target pemerintah adalah menasionalisasikan 80% tetapi kenyataannya hanya dapat menasionalisasikan 20% karena banyak pemilik modal yang menarik modalnya lebih dahulu. Ada pula program pembangunan nasional semesta berencana untuk memaksimalkan peran badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan meningkatkan peran koperasi.

Ada beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang diakibatkan karena adanya inflasi dari pemerintahan sebelumnya. Pertama, membentuk Dewan Perancang Nasional untuk mempersiapkan rancangan UU pembangunan nasional dan menilai pembangunan nasional dan pada tahun 1963, diganti menjadi Bappenas. Kedua, sanering yaitu menurunkan nilai mata uang kertas menjadi 10%. Ketiga, menekan laju inflasi dengan melakukan penghematan, pengawasan anggaran belanja, kebijakan pembekuan simpanan, dsb. Keempat, Deklarasi Ekonomi dengan membentuk Panitia Tiga Belas. Kelima, dana revolusi tetapi malah berdampak negatif dengan naiknya tingkat inflasi, kekacauan ekonomi, dan utang negara yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi di masa demokrasi terpimpin kurang berjalan dengan baik.

### **D. Hubungan antara kepentingan politik dan Kebijakan Ekonomi**

Banyaknya kepentingan politik di masa demokrasi terpimpin berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditetapkan. Pembangunan proyek mercusuar yang membutuhkan banyak biaya juga mempengaruhi kondisi ekonomi yang menyebabkan anggaran dana membengkak dan banyak terjadi inflasi sehingga dibuatlah kebijakan ekonomi untuk mengatasi hal tersebut. Tidak hanya itu, dengan adanya konfrontasi dengan Malaysia dan Pembebasan Irian Barat yang membutuhkan biaya yang besar dalam prosesnya membuat banyak terjadi krisis keuangan yang menjadi penyebab dibentuknya kebijakan-kebijakan ekonomi itu untuk mengatasi hal itu.

#### **E. Evaluasi Perkembangan Kehidupan Politik dan ekonomi pada Demokrasi terpimpin**

Menurut pendapat saya, ada beberapa kepentingan politik yang dilakukan, tetapi saya merasa itu tidak perlu. Salah satunya yaitu politik mercusuar. Saya pikir melakukan pembangunan proyek ini bukanlah hal yang utama atau prioritas dan jika tidak dilakukan saat itu juga, tidak akan ada yang terjadi. Masalahnya pada saat itu, kondisi keuangan negara juga sudah tidak baik, tetapi malah memaksakan untuk melakukan proyek ini sehingga yang terjadi adalah inflasi semakin meningkat dan anggaran dana semakin membengkak. Hal ini yang jelas malah menimbulkan masalah ekonomi yang lebih parah dari pemerintahan sebelumnya. Saya juga merasa bahwa kekacauan di masa ini dikarenakan banyak terjadi momen dimana presiden mengambil keputusan sendiri dengan tidak mendengarkan yang lain. Sebagai contoh, ketika PKI berusaha memanfaatkan nasakom, TNI AD sudah berusaha memperingatkan tetapi tidak digubris dan presiden malah tetap mempercayai PKI sehingga pada akhirnya terjadi puncak konflik tahun 1964. Sisi positif dari demokrasi ini yaitu tidak adanya lagi pergantian kabinet terlalu sering sehingga program kerjanya dapat terlaksana dengan baik. Jadi, dapat saya simpulkan dari kelebihan dan kekurangannya bahwa demokrasi terpimpin ini kurang cocok untuk Indonesia.